

Tuntutan Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Mengisi Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke 2

Oleh : Subowo



Subowo, dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 11 Juli 1947. Tamat dari Jurusan Perusahaan Fakultas Ekonomi UII pada tahun 1978, terus bekerja sebagai dosen di Fakultas tersebut. Pada tahun 1982 sampai 1984 menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Perusahaan Fakultas Ekonomi UII. Kemudian (1984-1986) menjadi Kepala Bidang Penelitian P3M Fakultas Ekonomi UII.

Pendahuluan

Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) telah memberikan landasan pembangunan untuk tahap berikutnya, sehingga pembangunan nasional dapat lebih dipercepat pada tahap berikutnya. Selama 25 tahun PJPT I, banyak hasil yang telah dicapai dan tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi transformasi sosial-ekonomi yang cukup mendasar sebagai hasil pembangunan pada tahap itu. Tolak ukur keberhasilan itu adalah apa yang menjadi rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk APBN telah dapat

dilaksanakan dengan baik. Demikian itu tercermin pula bahwa setiap lima tahun sekali Presiden sebagai mandataris MPR melaporkan hasil karya pembangunan nasional kepada MPR, dan MPR selalu menerima dengan mulus laporan pertanggungjawaban Presiden tersebut.

Perkembangan selama 5 Pelita telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang tercermin pada peningkatan pendapatan nyata masyarakat, menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1983 PBD atas dasar harga konstan sebesar Rp. 99.981,4 milyar dan pada tahun 1990 telah meningkat menjadi Rp. 115.447,1 milyar (Statistik Indonesia,

1991, hal. 549). Pada tahun 1980 presentase penduduk miskin sebesar 28,56%, pada tahun 1990 telah berkurang menjadi 15,08% (Masri Singarimbun, 1992 hal. 40), disamping juga meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan telah membawa kemajuan ekonomi ke seluruh pelosok tanah air, dengan membuka daerah-daerah yang terpencil dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, walaupun disadari bahwa pemerataan pembangunan antar daerah masih harus diperjuangkan.

Pembangunan juga telah mengubah kehidupan masyarakat bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, modernisasi telah terjadi dan arus informasi berlangsung dengan makin lancar. Masyarakat telah makin kritis dan terbuka. Pranata sosial yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan dalam kehidupan modern telah terbentuk dan semakin terwujud.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sasaran PJPT I telah dapat dicapai. Dalam bidang ekonomi sasaran itu adalah terciptanya tatanan ekonomi yang seimbang yaitu antara sektor industri dan sektor pertanian, dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

Peranan sektor industri dalam perekonomian telah berhasil ditingkatkan dari 8,3% pada permulaan pembangunan 1969/1970 menjadi 19,3% pada tahun kedua Pelita V. Sebaliknya, peranan sektor-sektor primer telah turun dari 56,3% menjadi 34,8%. Penduduk yang bekerja di sektor industri manufaktur juga telah meningkat dari 6,5% tahun 1971 menjadi 11,4% tahun 1990 (Ginjar Kartasasmita, 1992).

Dengan melihat sektor pembangunan ke dalam dua sektor kegiatan ekonomi yaitu : pertanian, industri pengolahan tampak

terjadi adanya transformasi struktural dalam hubungannya sumbangan masing-masing sektor terhadap PDB. Komposisi sumbangan sektor pertanian pada tahun 1969 sebagai awal Pelita I sebesar 49,3% menurun menjadi 32,7% pada tahun 1974 dan menurun lagi menjadi 24,1% pada tahun 1988. Sektor industri pengolahan meningkat dari 9,2% pada tahun 1969 menjadi 18,5% pada tahun 1988 (Gunawan Somodiningrat, 1992 hal 14). Adapun data lain untuk tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa komposisi sumbangan sektor pertanian terhadap PDB pada saat berakhirnya PJPT I telah menunjukkan keseimbangan dan sekaligus masing-masing sektor terus berkembang.

Dilihat dari segi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pangan dan sandang untuk sebagian besar masyarakat telah tidak merupakan masalah. Bahkan telah diketahui untuk kedua kebutuhan pokok itu Indonesia telah dapat swasembada, bahkan mengekspornya.

Apa yang telah dicapai dalam PJPT I itu merupakan modal dalam melaksanakan PJPT II. Dalam PJPT II diinginkan upaya memperkuat perekonomian agar menjadi sebuah tatanan yang kukuh. Tatanan ekonomi yang kukuh tidak lain adalah berlandaskan industri yang modern yang didukung oleh pertanian yang tangguh, dan sekaligus harus menuntaskan proses berkembangnya industrialisasi, agar dalam kurun waktu 25 tahun yang akan datang Indonesia menjadi negara industri yang sejajar dengan negara industri maju lain.

Dalam menyongsong PJPT II yang diidentifikasi sebagai Era Tinggal Landas, masalah yang harus menjadi perhatian adalah masalah "tuntutan pengembangan sumberdaya manusia." Karena hal ini adalah masalah sentral dalam

usaha mensukseskan pembangunan pada PJPT II dan pembangunan selanjutnya yang berkesinambungan (sustainable development). Hal itu sesuai dengan pendapat JB Sumarlin yang menyebutkan, bahwa: "Ada 3 bidang strategis dalam PJPT II yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu : Pembangunan mutu sumberdaya manusia, peningkatan tabungan nasional dan pembangunan kelembagaan, sehingga didalam memasuki PJPT II faktor pengembangan sumberdaya manusia merupakan syarat atau tuntutan yang harus dilakukan.

Tujuan Pembangunan Indonesia

Pembangunan nasional dilaksanakan dan yang akan terus dilaksanakan adalah berdasarkan pada UUD 1945 dan Panca Sila. Rumusan tujuan pembangunan Indonesia tercantum di Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan itu adalah hak dan kewajiban MPR yang menyusunnya. Pada bulan Maret 1993 MPR sibuk dan telah berhasil menyusun GBHN tahun 1993-1998, tentunya di harapkan semoga tujuan yang akan dicapai dalam usaha mensejahterakan dan meningkatkan martabat bangsa dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima dinyatakan bahwa : Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sperituil berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas dengan sebaik-baiknya disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang guna mengarahkan dan menyatukan langkah dalam pembinaan, dan pembangunan bangsa. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah tercapainya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan GBHN tersebut, Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, yang telah dirampungkan dengan selesainya Pelita Pembangunan Jangka panjang 25 tahun tahap kedua dan akan dimulai dengan Repelita VI.

Di bidang ekonomi sasaran utama PJPT I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan struktur ekonomi yang seimbang, yaitu struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat. Keadaan ini selanjutnya akan menjadi landasan bidang ekonomi untuk mengantarkan pembangunan Indonesia selanjutnya dengan memulai Proses Tinggal Landas yang memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan pada cita-cita diatas, di dalam memasuki Era Tinggal landas yang memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri, mengandung makna bahwa di dalam melaksanakan pembangunan nasional semaksimal mungkin akan memanfaatkan semua sumber daya sendiri. Tentunya termasuk didalamnya adalah pemanfaatan sumberdaya manusianya, sebagai faktor sentral dalam pembangunan.

Karena manusia disamping sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai tujuan pembangunan, yaitu terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat. Seperti disebutkan dalam GBHN 1988, bahwa tujuan pembangunan Indonesia seperti dinyatakan..... terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin dan dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia antara sesama manusia, manusia dan masyarakat, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Jamaluddin Aricok, 1992 hal 20).

Sehingga apabila pembangunan Indonesia dilihat dari aspek manusia dan masyarakat Indonesia, tujuan pembangunan tersebut berisikan dua aspek pokok yaitu pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat. Hal tersebut juga mengandung konsekuensi bahwa pembangunan tanpa adanya pembangunan kualitas manusia adalah nonsen.

Oleh karena itu di dalam menghadapi PJPT II yang pembangunannya mendasarkan kekuatan sendiri, maka faktor pembangunan atau peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah faktor strategis, dengan lain perkataan bahwa pengembangan sumberdaya manusia adalah "conditio equa non" bagi suksesnya PJPT II dan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Gambaran Sumberdaya manusia Indonesia.

Berbicara tentang sumberdaya manusia maka tidak terlepas dengan kependudukan, kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran maupun

pengembangan sumberdaya manusia itu sendiri, yaitu melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan tekanan bahasan pada makalah ini adalah pada kualitas sumberdaya manusia sehingga banyak membicarakan tentang aspek pendidikan.

Penduduk adalah sebagai sumberdaya pembangunan dan sekaligus sebagai beban pembangunan karena disamping penduduk tersebut berperan dalam menghasilkan PDB, tetapi sekaligus juga mengkonsumsinya. Program kependudukan yang berkaitan dengan program keluarga berencana dalam rangka untuk menurunkan pertumbuhan penduduk Indonesia oleh masyarakat dunia telah dinilai keberhasilannya.

Berkat dilaksanakannya program keluarga berencana serta bidang-bidang yang terkait, lalu pertumbuhan penduduk Indonesia telah menurun dari 2,3 % pada tahun terakhir Repelita III dan kemudian menjadi 2,2% pada tahun terakhir Repelita IV. Upaya pembangunan di bidang ini dilanjutkan dan makin dimantapkan dan diharapkan pada tahun terakhir Repelita V yang akan berakhir ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi 1,8%, sehingga laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama 5 tahun mendatang menjadi 1,9% per tahun (Repelita V, Buku I, 1989).

Meskipun laju pertumbuhan penduduk telah dapat diturunkan namun pertumbuhannya secara absolut masih sangat besar. Pada tahun 1961 jumlah penduduk Indonesia sebesar 97,085 juta, tahun 1971 sebanyak 119. 208 juta, tahun 1980 sebanyak 147,490 juta dan tahun 1990 sebesar 179,321 juta (Masri Singarimbun, 1992 hal. 18). Berarti selama tiga dasa warsa jumlah penduduk Indonesia kurang lebih telah bertambah dua kali lipat. Bertambahnya jumlah penduduk akan

menambah jumlah angkatan kerja, hal ini dilihat dari aspek pembangunan menuntut tersedianya kesempatan kerja.

Bersamaan dengan itu selama 5 tahun pada periode Pelita V, diperkirakan pencari kerja baru rata-rata sekitar 2,4 juta orang setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya angkatan kerja setiap tahun sebesar 2,4 memerlukan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan struktur ekonomi yang semakin seimbang. Adapun pertumbuhan ekonomi tiap tahun selama Pelita V sebesar 5%. Dengan demikian tersedia lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja baru tersebut.

Apabila sasaran pertumbuhan dan transmisi ekonomi tersebut berhasil terpenuhi tentunya bagian terbesar tambahan angkatan kerja tersebut akan dapat terserap. Dalam Pelita V ini sektor industri mampu menciptakan sekitar 2,4 juta lapangan kerja baru, dan sektor-sektor yang lain sebesar 5,2 juta lapangan kerja baru (Repelita V, Buku I, 1989 hal. 25).

Tingkat pendidikan dari angkatan kerja Indonesia pada umumnya meningkat, sesuai dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan pada umumnya. Struktur angkatan kerja menurut pendidikan di Indonesia, pada tahun 1987 tenaga kerja tidak berpendidikan 53%, SMTP sebanyak 34%, SMTA 11% sedangkan lulusan perguruan tinggi sebesar 2% (Yudo Swasono, 1990 hal. 8). Struktur ini mencerminkan keadaan di mana terdapat terlalu banyak tenaga kerja yang tidak berpendidikan, sedangkan tenaga kerja tidak berpendidikan ini kurang diperlukan dalam pembangunan.

Di sisi lain secara kuantitatif terdapat petunjuk yang kuat akan besarnya pengangguran di kalangan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMTA ke atas.

Pada tahun 1986 dari pencari kerja yang tercatat sejumlah 1,8 juta orang dan 49,4% dari mereka berpendidikan SMTA ke atas.

Dilihat dari aspek pendidikan mempengaruhi pasar sumberdaya manusia. Pasar sumberdaya manusia yang berkualitas rendah lantaran yang berpendidikan rendah diwarnai adanya surplus penawaran (labor surplus). Artinya untuk memperoleh sumberdaya manusia jenis ini tidak mengalami kesulitan, bahkan seringkali kewalahan dalam menyeleksi lamaran yang masuk. Akibatnya sumberdaya manusia jenis ini mempunyai harga dalam bentuk upah yang rendah atau murah. Sebaliknya bagi sumberdaya manusia dengan mutu yang tinggi justru diwarnai oleh melimpahnya permintaan (excess demand). Semua tersebut diatas menunjukkan adanya kesenjangan alokasi sumberdaya manusia yang disebabkan kualitas yang berbeda. Kesenjangan ini menggambarkan ketimpangan pasar sumberdaya manusia secara umum, disamping adanya kesenjangan di bidang lapangan kerja yang berhubungan dengan tingkat pendidikan. Kesenjangan ini bersifat vertikal maupun horisontal.

Kesenjangan vertikal ialah bahwa meningkatnya tenaga terdidik ternyata lebih pesat dari peningkatnya jumlah lapangan kerja yang dianggap sesuai dengan tenaga pendidikan demikian. Hal ini menyangkut angkatan kerja yang berpendidikan SMTA dan angkatan kerja dengan pendidikan perguruan tinggi (Repelita V, Buku I, 1989 hal 320). Kesenjangan selanjutnya yang menyangkut dunia pendidikan dan lapangan kerja adalah yang bersifat horisontal. Dengan kesenjangan horisontal dimaksudkan sebagai perbedaan antara jumlah lulusan menurut cabang ilmu pengetahuan dan profesi disatu pihak

dibandingkan dengan perkiraan jenis kebutuhan secara profesi oleh pasar tenaga kerja dilain pihak. Kelebihan ini terutama menyangkut bidang ilmu sosial (Repelita V, Buku I 1989 hal. 321)

Masalah kesenjangan, baik horisontal maupun vertikal bukanlah hanya masalah jumlah karena kesenjangan ini juga berkaitan dengan permintaan akan pendidikan dari masyarakat di satu pihak yang meningkat dengan pesat dan kemampuan sistem pendidikan untuk memberikan keluaran yang bermutu dilain pihak tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk memperkecil kesenjangan ini perlu ditingkatkan efisiensi mekanisme yang mengkaitkan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Pembangunan dalam Era Tinggal Landas.

Pelita V sebagai tahap akhir dari program Pembangunan jangka Panjang 25 tahun pertama (PJPT I) telah mampu menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus, sehingga di dalam Pembangunan Jangka Panjang II (PJPT II) proses pembangunan Indonesia sudah memasuki proses atau era tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Era tinggal landas yang akan dimulai pada PJPT II merupakan kelanjutan dari proses pembangunan dari PJPT I, sehingga kondisi yang telah dicapai sekarang terus berkelanjutan dan ditingkatkan pada masa-masa berikutnya. Dengan syarat bahwa kondisi dan struktur ekonomi benar-benar telah mendukungnya.

Tahap tinggal landas sebagai suatu

hasil kesinambungan dari tahap sebelumnya menurut Rostow, mempunyai ciri utama yaitu : (Lincolin Aesyad, 1992 hal. 45)

1. Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5. persen atau kurang menjadi 10 persen dari Produk Nasional Bruto (Net National Product = NNP).
2. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (leading sectors)
3. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

Disamping itu sektor pemimpin (leading sectors) yang tumbuh sangat tinggi tersebut harus memenuhi beberapa faktor.

1. Harus ada kemungkinan untuk perluasan pasar bagi barang yang diproduksi yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang dengan cepat.
2. Dalam sektor tersebut harus dikembangkan teknik produksi yang modern dan kapasitas produksi harus bisa diperluas.
3. Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pembangunan sektor pemimpin.
4. Pembangunan dan transformasi teknologi sektor pemimpin haruslah bisa menciptakan kebutuhan akan adanya perluasan kapasitas dan modernisasi sektor-sektor lain.

Melihat pengalaman sejarah bangsa lain mengenai mulai masa tinggal landas sektor pemimpin dalam proses pembangunan bangsanya adalah berbeda-beda. sebagai contoh Inggris masa tinggal

landas terjadi tahun 1783 - 1802, dengan sektor pemimpin industri tekstil. Amerika Serikat-masa tinggal landas terjadi tahun 1843 - 1860 dengan sektor pemimpin jaringan jalan kereta api dan Jepang masa tinggal landas terjadi tahun 1878 - 1900 dengan sektor pemimpin industri sutera.

Kemudian masa tinggal landas disusul oleh beberapa negara Asia dan Amerika latin antara lain adalah: Argentina tahun 1935, Turki tahun 1937, India tahun 1952 dan Cina komunis tahun 1952. Namun demikian dalam perjalanan berikutnya ternyata bahwa negara berkembang tersebut bahkan ialah kembali ke tahap sebelum tinggal landas. (Bambang Tri Cahyono, 1993).

Demikian gambaran persyaratan masa tinggal landas dan beberapa contoh negara yang telah mengalami masa tinggal landas. Kalau dapat dikatakan bahwa diantara negara tersebut ada yang berhasil melewati masa tinggal landas tersebut, tetapi ada yang tidak berhasil dan bahkan kembali ke masa sebelum tinggal landas.

Bagaimana dengan Indonesia ? Menurut Bambang Tri Cahyono, bahwa tidak dapat disangkal persyaratan tinggal landas versi Rostow di atas telah dipenuhi di Indonesia. Walau ada kekhawatiran bahwa masa tinggal landas bagi Indonesia akan bersifat sementara karena sektor pertanian sebagai sektor pemimpin belum dapat ditangani secara tuntas lima tahun mendatang (Bambang Tri Cahyono, hal 37). Tetapi banyak ahli berpendapat bahwa proses tinggal landas akan tidak ada halangan dan tetap berjalan.

Sekarang ini adalah masa peralihan menuju Era Tinggal Landas. Menurut Rostow kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan dalam menuju masa tinggal

landas. Peranan sektor pertanian antara lain : pertama, kemajuan pertanian menjamin penyediaan pangan bagi penduduk, hal ini akan menjamin terpenuhinya gizi dan penghematan devisa karena impor bahan makanan dapat dihindari; kedua, kenaikan produktivitas sektor pertanian akan memperluas pasar dari berbagai kegiatan sektor industri, disamping kenaikan pendapat sektor pertanian juga menaikkan penerimaan pajak bagi pemerintah yang akan menciptakan tabungan sehingga bisa meningkatkan investasi di sektor sektor lain.

Sebagai bukti keberhasilan pertanian bahwa yang sebelumnya Indonesia sebagai pengimport beras terbesar didunia sekarang telah membuktikan mampu swasembada beras, disamping terus meningkatkan pembangunan dibidang pertanian yang lain meliputi bidang perkebunan, peternakan dan perikanan. Banyak orang merasa optimis akan keberlangsungan pembangunan Indonesia untuk menjalankan proses tinggal landas.

Pergeseran Struktural dalam Proses Tinggal Landas

Seperti telah disebutkan dengan adanya transformasi ekonomi, peranan sektor pertanian semakin menurun, sebaliknya peranan sektor industri akan semakin meningkat. Walaupun peranan sektor pertanian semakin menurun, namun sektor ini masih diharapkan untuk melayani berbagai kebutuhan yang timbul dari pertambahan penduduk.

Disamping ciri seperti yang dikemukakan oleh Rostow, menurut kajian Kuznets yang dilanjutkan oleh Cheney dan Syrquin dalam hubungannya dengan pembangunan berpendapat : "peranan sektor pertanian di dalam out put dan

kesempatan kerja semakin turun, sebaliknya peranan sektor industri dan jasa semakin meningkat. Peranan sektor industri akan semakin meningkat sehingga akan melampaui peranan sektor pertanian. Pergeseran peranan dari sektor pertanian ke sektor industri ini diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Repelita VII, 1998/9 - 2003/4. (Boediono, 1990 hal. 12)

Pergeseran peranan sektor pertanian ke sektor industri ini akan mempengaruhi komposisi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dan sektor industri termasuk sektor jasa baik dalam jumlah maupun tingkat pendidikan yang diperlukan. Perbedaan persyaratan kerja di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri akan membatasi arus penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian tersebut. Tenaga kerja yang tetap tinggal di sektor pertanian adalah mereka yang mempunyai ketrampilan yang tinggi sehingga tidak dapat dilepaskan bekerja dari sektor pertanian. Mereka yang ketrampilannya rendah, tidak cukup banyak mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dengan sendirinya dilepas dari sektor pertanian dan akan sulit pula masuk ke sektor industri. Apa akibatnya ? Maka setiap calon tenaga kerja di dalam persaingan mengisi lapangan kerja yang sifatnya sangat kompetitif harus menyadari akan pentingnya pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kerja.

Dari sisi ini dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja untuk industri dan jasa tentunya termasuk industri pengolahan pertanian akan semakin besar. Hal ini akan memerlukan lebih banyak lagi investasi manusia yang menuntut disiapkannya persyaratan untuk menyongsong masa tinggal landas yang akan datang baik dalam bentuk suprapstruktur maupun infrastruktur

dengan menyesuaikan arah kebutuhan sumberdaya manusia masing-masing sektor

Pendapat Prof. Dr. Fuad Hasan yang dikutip Boediono mengemukakan : bahwa perubahan struktur ekonomi yang disampaikan diatas akan menimbulkan pulasuatutransisi nilai dimana nilai-nilai lama yang mendukung kehidupan masyarakat pertanian tidak dapat berlaku lagi, sementara nilai-nilai baru yang mendukung kehidupan masyarakat industri belum mantap. Dalam periode tersebut akan berlangsung suatu proses transisi yang dapat menimbulkan suatu "anomi" dimana terjadi "gejala kekaburan norma dalam masyarakat, khususnya masyarakat tradisional yang tertutup menuju ke arah masyarakat yang modern dan terbuka, kekaburan norma-norma ini menyebabkan warga masyarakat yang bersangkutan tidak punya pedoman yang tegas lagi tentang ukuran-ukuran sosial yang berlaku. Dikemukakan selanjutnya disamping itu akan timbul juga suatu gejala yang disebut "heteronomi" dimana terdapat "..... kenyataan adanya berbagai norma yang sekaligus dianut oleh berbagai-bagai golongan dalam suatu masyarakat. Golongan muda punya norma-normanya sendiri, golongan pedagang punya norma-normanya sendiri dan begitu seterusnya.

Gejala anomie dan heteronomie ini berpengaruh diberbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan ketenagaan kerja. Di bidang pendidikan, pendidik tidak tahu lagi apa norma-norma yang harus difegaskan untuk dianut dan apa pula yang harus ditolak; sedangkan di bidang ketenagaan kerja, tenaga kerja tidak tahu lagi apakah harus menganut norma-norma kerja lama yang sudah usang sementara harus menganut norma-norma baru yang belum mantap. (Boediono, 1990

hal.14-15)

Disamping adanya pergeseran struktur secara umum seperti disebutkan diatas dalam masa yang akan datang juga akan terjadi pergeseran struktur tenaga kerja menurut pendidikan. Struktur tenaga kerja menurut pendidikan menggambarkan latar belakang pendidikan dari tenaga kerja yang dalam hal ini dikategorikan dalam tenaga kerja yang tidak berpendidikan, berpendidikan dasar, berpendidikan menengah, dan berpendidikan tinggi. Dalam jangka panjang proporsi tenaga kerja menurut tingkat pendidikan ini akan berubah atau bergeser dalam kaitannya dengan pertumbuhan yang dapat dicapai dalam suatu tahap pembangunan ekonomi.

Pola keterkaitan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan, bahwa proporsi tenaga kerja dibawah pendidikan dasar akan semakin berkurang dengan meningkatnya pembangunan ekonomi dan mereka yang menamatkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Tenaga kerja yang tidak memperoleh pendidikan akan semakin meningkat pada awal pembangunan ekonomi, tetapi kemudian semakin menurun meningkatnya jumlah mereka yang berpendidikan dasar, menengah dan yang berpendidikan tinggi. Pola perubahan struktur ini diharapkan akan berlangsung bersama dengan meningkatnya pembangunan nasional di masa depan (Boediono, 1990 hal 16)

Dalam kaitan tentang komposisi tenaga kerja tersebut Boediono memberikan gambaran komposisi tenaga kerja menurut pendidikan di Indonesia pada akhir tahun 1980-an menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tidak bersekolah sebesar 53 persen, mereka yang

berpendidikan dasar sebesar 34 persen, mereka yang berpendidikan menengah sebesar 11 persen, mereka yang berpendidikan universitas sebesar 2 persen. Komposisi ini mencerminkan keadaan di mana terdapat terlalu banyak tenaga kerja yang tidak berpendidikan, sedangkan tenaga kerja tidak berpendidikan ini tidak diperlukan dalam pembangunan. Kemudian Boediono melakukan prakiraan sebagai berikut : Untuk memungkinkan Indonesia memasuki proses tinggal landas maka proporsi tenaga kerja yang berpendidikan menengah dan dasar harus ditingkatkan sesuai dengan pola proporsi tenaga kerja negara yang telah melakukan tinggal landas. Pada akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua, proporsi tenaga kerja yang berpendidikan menengah dan dasar dapat ditingkatkan menjadi 84 persen, sedangkan proporsi mereka yang tidak berpendidikan menurun sebesar 11 persen, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 7 persen. (Boediono, 1990 hal 18).

Adanya Keterkaitan yang sangat erat antara pendidikan dan ketenaga-kerjaan, maka pendidikan dan ketenaga-kerjaan mempunyai peranan yang penting dalam menghadapi pergeseran struktur, perubahan komposisi dan perubahan nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan tuntutan pengembangan sumber daya manusia selama periode tinggal landas atau PJPT II.

Oleh karena itu beberapa masalah yang ada kaitannya dengan tuntutan pengembangan sumber daya manusia dalam mengisi PJPT II harus dicermati dan dicarikan jalan keluarnya. Adapun beberapa masalah tersebut antara lain :

1. Perubahan struktur ekonomi akan mempengaruhi perubahan komposisi tenaga kerja menurut tingkat pendidikan.

2. Kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang terjadi, bukan hanya disebabkan karena pendidikan tidak dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja, melainkan juga karena permintaan pengetahuan dan ketrampilan akan berkembang lebih cepat lagi.
3. Penyebaran tenaga kerja antar daerah yang tidak merata akan menimbulkan masalah turunan yaitu daerah yang memiliki kelebihan jumlah tenaga kerja akan timbul pengangguran dan daerah yang kekurangan kerja akan tidak efektif dalam mengembangkan sumberdaya lain yang dimilikinya.

Untuk menjawab masalah tersebut sebetulnya tidak cukup hanya dibahas dari sudut pandang pendidikan dan ekonomi, tetapi harus meliputi semua aspek atau sudut pandang yang ada kaitannya dengan manusia. Tetapi bahwa pendidikan diperlukan dalam pembangunan khususnya dalam hubungan dengan pembangunan sumberdaya manusia, hal ini sudah merupakan kesepakatan umum.

Meskipun sudah ada semacam kesepakatan umum bahwa pendidikan diperlukan dalam pembangunan dan pendidikan mempunyai kaitan erat dengan dunia kerja, tetapi mengenai bagaimana lulusan (output) pendidikan itu dihasilkan masih mengundang banyak perdebatan. Sehingga ada istilah lulusan pendidikan siap pakai, lulusan pendidikan siap dikembangkan atau lulusan pendidikan siap dilatih dan sebagainya.

Sehubungan dengan pergeseran struktur ekonomi maka akan diikuti dengan pergeseran komposisi tenaga kerja. Pergeseran komposisi akan menimbulkan kebutuhan peningkatan pendidikan dan

ketrampilan yaitu sesuai dengan yang diperlukan untuk mengembangkan sektor industri. Sehubungan itu pula perubahan struktur ekonomi akan mempengaruhi komposisi tenaga kerja menurut tingkat pendidikan, maka bidang pendidikan yang dikembangkan harus relevan dengan tuntutan lapangan kerja dan sekaligus menekan sekecil mungkin jumlah tenaga kerja yang tidak terdidik. Hal ini dilakukan agar, kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Kemudian didalam usaha untuk pemerataan pemanfaatan kelebihan tenaga kerja antar daerah diperlukan usaha-usaha keseimbangan relatif dalam bentuk investasi pembangunan, sehingga tenaga kerja akan tertarik untuk pindah ke daerah baru yang akan dikembangkan antara lain ke Indonesia Bagian Timur (IBT).

Tuntutan mengembangkan sumberdaya manusia dalam PJPT II

Dalam strategi pembangunan suatu negara dapat memilih strategi pembangunan yang bersifat padat modal dan padat teknologi atau strategi padat karya. Salah satu alasan suatu negara menganut strategi pembangunan padat modal adanya anggapan karena jumlah sumberdaya manusia dan kadang-kadang juga variabel tanah adalah relatif banyak maka diasumsikan bahwa kegagalan pembangunan terletak pada variabel yang relatif langka yaitu modal. Berkaitan dengan alasan tersebut Hidayat dalam sebuah artikelnya menyatakan: Modal fisik dan sumber daya alam pada hakekatnya merupakan faktor produksi yang pasif. Oleh karena itu kalau strategi pembangunan didasarkan kepada modal dan sumber daya alam tidaklah tepat, mengingat variabel yang aktif ialah sumberdaya manusia. Ada

suatu hipotesa yang menyatakan bahwa: suatu negara yang tidak mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki bangsanya serta mencurahkan secara efektif untuk kepentingan pembangunan maka negara tersebut tak akan mampu membangun bidang lain. (Priyono Tjiptoherijanto, 1982 hal 69). Searah dengan pendapat tersebut JB Sumarlin berpendapat, bahwa manusia merupakan sumberdaya yang lestari dari setiap perwujudan dari kemampuan "daya saing" suatu bangsa atau negara. (JB Sumarlin, 1992).

Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa suatu strategi pembangunan yang berorientasi kepada sumberdaya manusia bertujuan untuk meningkatkan mutunya, yaitu peningkatan mutu yang dikaitkan dengan penyediaan kesempatan kerja. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia tidak terlepas dengan meningkatnya pendidikan dan harus dikaitkan dengan lapangan kerja yang harus disediakan.

Dalam Era Tinggal landas pada PJPT II salah satu cirinya adalah industrialisasi yang didukung sektor pertanian yang tangguh. Karena itu, PJPT II sangat strategis dalam proses pembangunan bangsa selanjutnya. Hal ini disebabkan karena PJPT II adalah sebuah kelanjutan langkah pembangunan yang terdahulu dan sebagai tahap prasyarat bagi pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu maka didalamnya terkandung resiko kegagalan yang dapat mengancam ketidak berhasilan pembangunan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam memasuki era PJPT II sangat tergantung pada tingkat kualitas sumberdaya manusia sebagai subyek pembangunan. Dalam hal ini pendidikan memegang peran yang sangat strategi. Sebab pada gilirannya,

pendidikanlah yang punya tanggungjawab moral mengantarkan sumberdaya manusia untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) disamping peningkatan atau pengembangan berbagai aspek antara lain mental, etika, bakat, semangat kerja dan sebagainya. Tanpa penguasaan Iptek, sulit rasanya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dapat terwujud, khususnya pada PJPT II yang dicirikan sebagai masa proses industrialisasi yang sarat dengan pemanfaatan kemajuan Iptek, disamping dituntut moral kerja yang baik. Apabila tidak maka berarti kita akan selalu tergantung pada bangsa lain dalam melakukan pembangunan dan ini tidak searah dengan ciri masa tinggal landas yang dituntut kemandirian.

Dalam kaitannya antara peran sumberdaya manusia dengan pembangunan, Prof. Dr. Saleh Affif melihat pentingnya peranan manusia dalam kontak pembangunan nasional. Secara nasional, pengembangan sumberdaya manusia, ditekankan pada peningkatan derajat kesehatan dan mutu hasil pendidikan. Menurutnya, perbaikan kedua bidang itu akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Sementara Prof. Dr. Emil Salim menekankan pentingnya peran sumberdaya manusia dalam menciptakan manusia yang mampu berfikir jangka panjang, memasuki konsep lingkungan dalam dunia usaha. (Usahawan, 1992 hal 17). Kalau kedua konsep tersebut digabungkan mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia di dalam berperan dalam proses pembangunan khususnya pada PJPT II harus mempunyai kualitas kesehatan, penguasaan Iptek dan sekaligus berwawasan jangka panjang dalam memandang pembangunan yang berkelanjutan.

Demikian pula pada hakekatnya pendidikan itu sendiri secara ideal sebagai suatu gejala jangka panjang memang ditekankan untuk membentuk manusia seutuhnya. Sebagai kelanjutannya, dalam skala yang lebih luas, tujuan pendidikan dalam jangka panjang adalah meneruskan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam jangka panjang ini, pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Sebagai suatu gejala jangka menengah atau sedang, pendidikan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dalam pengertian suatu sarana untuk memantapkan pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan yang diperlukan dunia kerja (Priyono Tjiptoherijanto, hal 8).

Sehingga dilihat dari aspek waktu tersebut sesungguhnya pendidikan itu mempunyai dua tujuan sekaligus. Pertama, pendidikan sebagai instrumen sosial merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti kesatuan bangsa dan pembangunan nasional dalam membentuk manusia seutuhnya. Kedua, pendidikan itu ditujukan sebagai realisasi diri (self-realization), yaitu keinginan individu untuk mengembangkan potensinya untuk hidup lebih baik bagi dirinya dan sesamanya dalam masyarakat.

Oleh karena itu dalam memasuki PJPT II harus mampu mencapai dua tujuan pendidikan tersebut, dimana pada hakekatnya kedua tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Memasuki masyarakat industri modern merupakan sebuah proses. Seperti telah disebutkan, bahwa dalam era modernisasi itu akan terjadi perubahan struktur ekonomi. Dari ekonomi yang berdasarkan pertanian ke struktur berdasarkan industri, disamping perubahan struktur pendidikan dengan angkatan kerja. Perubahan struktur tersebut

disamping merubah persyaratan kualitas angkatan kerja dan penurunan jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam sektor pertanian, juga akan mengubah sikap, cara hidup dan cara berfikir masyarakat. Karena akan muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya belum dikenalnya, hal tersebut memerlukan penafsiran dan pendefinisian yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia.

Oleh karena itu sehubungan tuntutan pengembangan sumberdaya manusia memasuki PJPT II, maka dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia harus tidak meninggalkan nilai budaya bangsa, dan harus diingat bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Artinya apa yang kita perbuat dibidang pengembangan sumberdaya manusia sekarang akan mempengaruhi wajah dan warna sumberdaya manusia jauh dimasa yang akan datang. Oleh karena itu dalam kita memasuki PJPT II, maka kualitas sumberdaya manusia harus selalu dikembangkan. Dalam hal ini maka pendidikan punya tanggung jawab moral terhadap pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Disamping jalur pendidikan formal maka jalur pendidikan informal harus dikembangkan bersama-sama dan diperlukan pula adanya keterkaitan dengan sisten pelatihan yang ada di dunia usaha. Dalam ruang lingkup nasional perlu adanya perencanaan ketenaga kerjaan yang dikaitkan dengan program pengembangan pendidikan baik yang formal maupun informal. Hal itu harus dilakukan dalam rangka menopang agar apa yang dilakukan di sektor pendidikan akan terkait dengan rencana penyediaan lapangan kerja. Dengan lain perkataan bahwa dalam upaya untuk

memacu peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai tuntutan untuk mengisi PJPT II harus dilaksanakan secara "all out" karena ini adalah kunci utama bagi bangsa Indonesia dalam memasuki dan mengisi PJPT II.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) akan berakhir dan tentunya akan disusul dengan PJPT II. Dimana PJPT II ini diidentifikasi sebagai Era Tinggal Landas.
2. Masa tinggal landas ditandai adanya transformasi ekonomi nasional, dimana pembangunan diarahkan kepada pengembangan industri yang maju dan modern yang didukung oleh kemajuan sektor pertanian yang tangguh, disamping dalam melaksanakan pembangunan dituntut kemandirian.
3. PJPT II sebagai Era Tinggal Landas merupakan proses pembangunan diarahkan pengembangan industri modern dengan kemandirian, maka sangat memerlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia khususnya dalam penguasaan Iptek, sehingga bangsa Indonesia di dalam penyediaan sumberdaya untuk pembangunan industrinya tidak tergantung pada pihak luar. Disamping harus disadari bahwa manusia adalah sumberdaya yang aktif dan lestari dari setiap perwujudan kemampuan "daya saing" suatu bangsa dan negara.
4. Karena di dalam proses modernisasi akan juga terjadi pergeseran nilai-nilai, maka dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia Indonesia di dalam

mengisi PJPT II, juga harus meningkatkan kualitas etika dan moralitas, jangan sampai menyimpang dengan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila.

5. Untuk memacu peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai tuntutan untuk mengisi PJPT II harus dilaksanakan secara "all out" karena ini adalah kunci utama bagi bangsa Indonesia dalam memasuki dan mengisi PJPT II. Yaitu berupa pengembangan kualitas sumber manusia yang terprogram dan terintegrasi antarbidang yang terkait, baik lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan informal dan dunia usaha serta pemerintah. Dengan maksud lembaga pendidikan sebagai penyedia sumberdaya manusia dan dunia usaha dan pemerintah sebagai pencipta lapangan kerja akan dapat kerja sama sebaik-baiknya. Disamping pendidikan juga diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.
6. Untuk memanfaatkan sumberdaya manusia secara optimal harus memperhatikan keseimbangan penyebaran sumberdaya manusia antar daerah khususnya dari Jawa ke luar Jawa sehingga dengan demikian sumberdaya lain akan dapat dimanfaatkan pula secara optimal.

Daftar Pustaka

- Abd. Rasyid As'ad, *Masalah pendidikan dan peningkatan SDM*, Bisnis Indonesia, Kamis, 13 Agustus 1992.
- Boediono dan Abas Gozali, *Pendidikan dan Pergeseran struktural dalam periode tinggal landas*, Diskusi panel dengan demokrasi kita jelang pembangunan

- Jangka Panjang II, Lustrum ke-7 Fakultas Ekonomi UGM, 1990.
- Bambang Tri Cahyono, H., *Strategi Pembangunan Berkelanjutan dalam Era Tinggal Landas*, Jurnal MBA, Vol I No. 5.
- Djamaludin Ancok, *Lingkungan Sosial dan Bisnis*, Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, 1992.
- Ginanjjar Kartasasmita, *Pemerataan Deregulasi Ekonomi Menyongsong PJPT II*, Suara Pembaharuan, Jum'at 28 Februari 1992.
- JB. Sumarlin, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dunia terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Kedaulatan Rakyat, Senin 17 Februari 1992.
- , *Kajian Perekonomian Indonesia*, Vol X No. 01 Januari 1991.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 2, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta, 1992.
- Masri Singarimbun, Dr., MA., *Struktur dan Perkembangan Demografik*, Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1992.
- Prijono Tjiptoherijanto dan kawan, *Sumber Daya Manusia*, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi, Lembaga Penerbitan Ekonomi Universitas Indonesia; Jakarta, 1982.
- Gunawan Sumodiningrat MEC., PhD., *Lingkungan Ekonomi*, Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, 1992.
- , *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/1990 - 1993/1994*, Buku I.
- , *Statistik Indonesia*, 1991, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- , *Usahawan*, No. 10 Th. XXV Oktober 1992.
- Yodo Swasono dan Boediono, *Prospek Sumber Daya Manusia pada Pembangunan Jangka Panjang*, Diskusi panel dengan Demokrasi Ekonomi Kita Jelang Pembangunan Jangka Panjang II, Lustrum ke-7 Fakultas Ekonomi UGM, 1990.